

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggung jawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggung jawabkan pada akhir periode perencanaan.

Penyusunan Perubahan Renstra ini ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Kecamatan Pasilambena yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. Berkenaan dengan adanya perubahan sasaran kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026, maka perlu dilakukan perubahan juga pada dokumen Renstra Perangkat Daerah. Pada Perubahan Renstra ini untuk satu eselon III memegang minimal satu program dan satu eselon IV juga memegang minimal satu kegiatan sehingga pengukuran kinerja lebih mudah dilakukan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan strategis untuk mendongkrak pencapaian kinerja setiap tahunnya sehingga mencapai target kinerja pada akhir masa Rencana Strategis.

Renstra Perangkat Daerah memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan indikatif OPD, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diindikasikan melalui 4 tahapan perencanaan, yakni : (1) Tujuan pelayanan Perangkat Daerah (2) Rumusan target yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (3) Identifikasi kemudahan dan hambatan dalam mencapai target kinerja dan; (4) Pengembangan rencana atau serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai target kinerja yang diinginkan.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka secara otomatis Renstra Kecamatan Pasilambena juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, serta RPJM Nasional.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026, disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

- Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan;
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Permendagri No. 050- 3889 Tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan pembangunan Daerah.
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah

- Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302).
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
  37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor

- 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98);
40. Peraturan Bupati Kab. Kepulauan Selayar No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Cara Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara logis, efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan perubahan Renstra Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati MKepulauan Selayar untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang.
2. Dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (sustainability development) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita- cita masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan SelayarMo selama 5 tahun mendatang

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Keseluruhan materi Renstra ini disusun dan termuat dalam 7 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **BAB II**

#### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PASILAMBENA**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.3. Kinerja Pelayanan Keca Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PASILAMBENA**

## **BAB IV**

### **ISU STRATEGIS**

- 4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar
- 4.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 4.3. Penentuan Isu-Isu Strategis
- 4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pasilambena dalam 5 (lima) tahun mendatang. Demikian pula dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026.

## **BAB VI**

### **A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **B. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dikemukakan indikator kinerja Kecamatan Pasilambena yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pasilambena dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022 – 2026 sesuai dengan Visi dan Misi BUpati dan Wakil Bupati periode 2021 - 2026.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup disertai penjabaran Renstra Perangkat Daerah lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN DAN PELAYANAN KECAMATAN**  
**PASILAMBENA**

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Pasilambena mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dengan tata kerja sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan hal tersebut maka di bawah ini dijelaskan tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kecamatan Pasilambena :

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah  
Fungsi Kecamatan**

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Desa atau Kekayaan Desa lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
7. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perizinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban

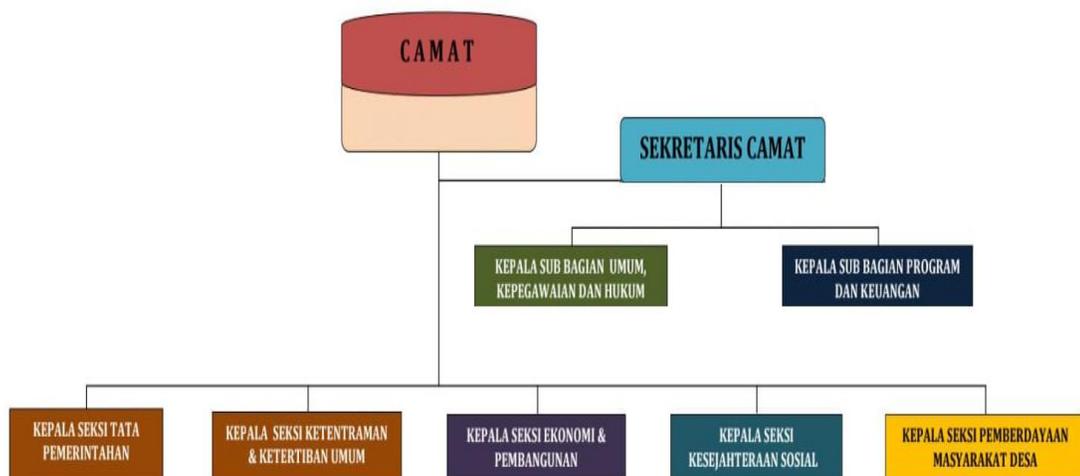
Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;

8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
5. Seksi Tata Pemerintahan
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
8. Seksi Kesejahteraan Sosial
9. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

### **STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PASILAMBENA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Pasilambena juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan

## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Pasilambena Kepulauan Selayar**

Sumber daya Kecamatan Pasilambena yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur**

Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pendidikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.1. Data Pegawai Kecamatan Pasilambena  
Berdasarkan Jabatan

No.	JABATAN	JUMLAH		PERSENTASE	
		PNS	PHL	PNS	PHL
1	Camat	1	-	7.14%	-
2	Sekretaris	1	-	7.14%	-
3	Kepala Seksi	5	-	35.71%	-
4	Kepala Sub Bagian	2	-	14.28%	-
5	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	14.28%	0%
6	JFT. Pekerja Sosial	0	0	0%	0%
7	JFT. Penyuluh Sosial	0	0	0%	0%
8	Pengolah Data Informasi	0	0	0%	0%
9	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	0	0	0%	0%
10	Pengadministrasi Perkantoran	3	13	21.42%	86.66%
11	Pengelola Layanan Operasional	0	2	0%	13.33%
<b>27</b>		14	15	100%	100%

Tabel 2.2. Data Pegawai Kecamatan Pasilambena  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH		PERSENTASE	
		PNS	PHL	PNS	PHL
1	S2	1	0	7,14%	0%
2	S1	9	8	64,28%	53,34%
3	D3	1	1	7,14%	6,66%
4	SLTA	3	6	21,42%	40%
5	STLP	0	0	0%	0%
6	SD	0	0	0%	0%
<b>TOTAL</b>		14	15	100 %	100 %

Tabel 2.3. Data Pegawai Kecamatan Pasilambena Berdasarkan  
Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	-	4	-	-	-	-	-	-	4
5	III/c	-	1	-	-	-	-	-	-	1
6	III/b	-	2	1	-	-	-	-	-	3
7	III/a	-	2	-	-	-	-	-	-	2
8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	II/c	-	-	-	-	-	1	-	-	1
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Jumlah		1	9	1	-	-	3	-	-	14

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta menjalankan rutinitas perkantoran dan pelayanan publik di Kecamatan Pasilambena

terdiri atas sarana dan prasarana yakni gedung kantor, meubiler, peralatan dan perlengkapan kantor yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No 03 Latokdok Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	tahun pembelian	Asal usul	Keterangan	
					Kondisi	Fisik
1	Mesin Proses Apung Lain-lain	Yanmar	2014	Pembelian	RUSAK BERAT	Mesin Kapal 3 Unit..
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	Toyota / Rush S MT F 700	2007	Pembelian		Sekretariat Daerah
3	Sepeda Motor	Yamaha / Vixision	2013	Pembelian		
4	Sepeda Motor	yamaha / Mio	2013	Pembelian		
5	Sepeda Motor	Zusuki / Thunder 125 N	2007	Pembelian	RUSAK RINGAN	FISIK ADA
6	Sepeda Motor	zusuki F1 / SHOGUN 125	2007	Pembelian		
7	Sepeda Motor	YAMAHA / MIO M3 125 CC	2015	Pembelian		
8	Sepeda Motor	Yamaha /	2016	Pembelian		

		Yamaha New Mio M3 125				
9	Sepeda Motor	Yamaha / Mio Soul GT AKS SSS	2018	Pembelian		
10	Kendaraaa n Bermotor Beroda Tiga Lain- lain	KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA	2015	Pembelian	RUSAK RINGAN	ALAT ANGKUT RODA 3
11	Kapal Motor	kapal Kayu / Kapal motor	2014	Pembelian	RUSAK BERAT	Kapal motor angkutan Mahkota Pasilamben a
12	Filling Besi/Metal	Brother / -	2007	Pembelian		
13	Lemari Makan	-	2008	Pembelian		
14	Lemari Kayu	- / -	2004	Pembelian		
15	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	-	2009	Pembelian	RUSAK BERAT	FISIK ADA
16	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	GOLD POSTUR EMATIC	2018	Pembelian		
17	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	PILLO AMERIC AN	2018	Pembelian		

18	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	-	2008	Pembelian		
19	Meja Rapat	-	2009	Pembelian		
20	Meja Rapat	-	2018	Pembelian		
21	Meja Rapat	-	2018	Pembelian		
22	Meja Makan	-	2008	Pembelian		
23	Meja Makan	-	2018	Pembelian		Meja Makan dan Kursi Makan
24	Kursi Rapat	Futura	2014	Pembelian		Kursi Rapat (1 Paket. ) 30 Buah.
25	Kursi Rapat	-	2018	Pembelian		
26	Kursi Rapat	-	2018	Pembelian		
27	Kursi Tamu	-	2008	Pembelian	RUSAK BERAT	FISIK TIDAK ADA
28	Kursi Tamu	-	2018	Pembelian		
29	Kursi Biasa	-	2008	Pembelian	RUSAK BERAT	FISIK TIDAK ADA
30	Tenda	Tenda Terowongan	2017	Pembelian		Tenda Terowongan
40	Sofa	-	2018	Pembelian		
31	Lemari Pakaian	-	2008	Pembelian		
32	MOUBILER LAINNYA	- / -	2004	Pembelian		
33	Alat Pendingin	Sharp	2011	Pembelian		Kulkas Serbaguna..

	Lain-lain					
34	Alat Pendingin Lain-lain	-	2011	Pembelian		Kulkas Satu Pintu
54	Televisi	Panasonic	2008	Pembelian		
35	Sound System	BMB Audio Sistem / CS 450 V	2014	Pembelian		Sound Syistim untuk aula
36	Lap Top	Sony	2013	Pembelian	RUSAK RINGAN	FISIK ADA
37	Lap Top	Accer	2014	Pembelian		
38	Lap Top	ACCER / LAKTOP ACCER	2015	Pembelian		
39	Lap Top	LENOVO ULTRABOOK YOGA 13	2015	Pembelian		
40	Lap Top	ACCER	2016	Pembelian		LAPTOP
41	Lap Top	Lenovo V330-6WID	2018	Pembelian		
42	Lap Top	Lenovo IP320	2018	Pembelian		
43	Lap Top	Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo	2019	Pembelian		CAMAT PASILAMBE NA
44	Lap Top	Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo	2019	Pembelian		SEKCAM

72	Printer	Canon IP 2770 / IP 2770	2014	Pembelian		Printer Canon
73	Printer	CANON MP 280 / MP 280	2015	Pembelian		PRINTER
74	Printer	CANON / MP 280	2015	Pembelian		PRINTER
45	Printer	CANON / IP 2770	2015	Pembelian		PRINTER
46	Printer	Hp Deksjet / -	2007	Pembelian	RUSAK BERAT	FISIK ADA
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	2009	Pembelian		
48	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	Futura	2014	Pembelian		
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Futura / Sandara n Tinggi	2014	Pembelian		
50	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother / -	2007	Pembelian		
51	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Brother	2014	Pembelian		Lemari Arsip 1 Buah
52	Proyektor + Attachment	Sony /VPLDX1 02HDMI	2015	Pembelian		LCD dan Screen Sony (Proyektor)

53	Microphone/Wireless Mic	-	2009	Pembelian	RUSAK BERAT	FISIK ADA
54	Microphone/Wireless Mic	VISHIBA / PRO VT-U1009NEW	2015	Pembelian		
55	Professional Sound System	Yamaha	2012	Pembelian		Keyboard Elektron
56	Camera Electronic	EOS 1500D / GS1-128	2019	Pembelian		CAMAT
57	Amplifier	DA - 2000 Pro / ICKC 0920	2014	Pembelian		
93	Sound System	-	2009	Pembelian		
58	Handy Talky	Morgen / MGH.8	2017	Pembelian		
58	Lemari Arsip	Brother	2021	Pembelian		
59	Genset		2022	Pembelian		
60	Sound system		2021	Pembelian		
61	Laptop	Deel	2021	Pembelian		
62	Laptop	Lenovo	2021	Pembelian		
63	TV	LG	2021	Pembelian		

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasilambena**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan mengamati pencapaian kinerja dengan segala potensi yang timbul selama 5 tahun. Setelah mengetahui trend tersebut yang kemudian dirumuskan dalam perencanaan logis berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pasilambena mengacu pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 09 Tahun 2007. Sasaran/target Renstra Kecamatan Pasilambena periode sebelumnya, menurut Standar Pelayanan Minimal di tingkat kecamatan dan diselaraskan dengan indikator SDG's atau indikator yang telah terstandar mengacu pada RPJMD.

**Tabel 2.5. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pasilambena Tahun 2016-2021 (TC.23)**

No	Indikator Kinerja sesuai Tupoksi SKPD	Target NSPK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi																		
	❖ Jumlah RW tertib administrasi		Jumlah RK yang melaksanakan tertib administrasi		5	6	7	8	8	3	3	5	7	8	3:5	1:2	5:7	7:8	1:1
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan tipologi)		Keberadaan Profil Kecamatan		1 dok	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				
	❖ Pembinaan Desa ( Desa terbaik)		Pembinaan Desa		1 keg	0	0	0	1	1	0:1	0:1	0:1	1:1	1:1				
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pemerintahan		1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja																		

	❖ SOP bidang administrasi umum, kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan		Keberadaan SOP bidang Administrasi		1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun		Dokumen Tupoksi, ABK, Anjab		3 dok	3	3	3	3	3	11	1::1	1:1	1:1	11				
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun		Peingkatan Kedisiplinan PNS		90 %	80 %	90 %	95 %	95 %	80 %	80 %	80 %	85 %	85 %	8:9	1:1	9:8	17:19	17:19
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat																		
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP		Identitas kependudukan		90 %	91 %	92 %	93 %	94 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	1:1	90:91	90:92	90:93	90:94
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun		Keberadaan SOP bidang Pelayanan		1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				
4	Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat																		
	❖ Terbinanya kader		Pembinaan		2 keg	2	2	2	2	2	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1				

	POSYANDU dan PKK		kader Posyandu																
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS		Sekolah yang ada UKS	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama		Toleransi antar umat beragama																
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan		Bantuan rumah ibadah	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan UKM binaan																		
	❖ Jumlah UKM yang aktif		Pembinaan UKM	3 unit	-3 unit	-3 unit	1 unit	3 unit	0	0	0	1	2	0:3	0:3	0:3	1:1	2:3	
	❖ Jumlah Koperasi aktif		Pembinaan Koperasi	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0:2	0:2	0:2	0:2	0:2	
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun		Keberadaan SOP Ekbang	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1 SOP	1	1	1	1	1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin		Pembinaan kemitraan UKM	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	1 prog	0	0	0	1	1	0:1	0:1	0:1	1:1	1:1	
6	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat																		
	❖ % penurunan		Pembinaan Ketenteram	20 %	20 %	10 %	10 %	10 %	20	20	10	10	10	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

	pelanggaran K3		an, Ketertiban dan Keamanan																
	❖ % penurunan illegal logging		Pencegahan Illegal Logging		80 %	85 %	90 %	90 %	90 %	80	85	90	90	90	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
	❖ % penurunan illegal fishing		Pencegahan Illegal Fishing		30 %	30 %	20 %	20 %	20 %	20	20	10	10	10	2:3	2:3	1:2	1:2	1:2
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun		Keberadaan SOP Trantibun		1 SOP	1	1	1	1	1	1::1	1:1	1:1	1:1	1:1				

Penjelasan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi :
  - ◆ Koordinasi dengan aparatur pemerintah desa yang masih lemah sehingga administrasi kependudukan dilakukan oleh aparatur/staff desa
  - ◆ Pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa yang masih belum dipahami secara mendasar
  - ◆ Tingkat pendidikan masyarakat secara umum masih sangat kurang. Orientasi kehidupan sehari-hari hanyalah pada pemenuhan kebutuhan. Seringkali tingkat pendidikan, kesehatan dll masih sangat kurang
2. Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja :
  - Tingkat keberhasilan tercapai. Hal ini karena koordinasi kepa staf/pegawai yang jumlah kecil sehingga memudahkan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat :
  - ◆ Kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan dengan memberikan pelayanan yang baik dan cepat sehingga target capaiannya baik.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat :

- ❖ Capaian capatinrget baik, namun ada target yang kecil karena secara realistis seperti dipaparkan sebelumnya, masyarakat secara umum masih berorientasi pada pemenuhan ekonomi sehingga masalah kesehatan seperti keberadaan Posyandu masih belum menjadi kebutuhan penting.

Tabel 2.6. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Pasilambena Tahun 2016-2021 (TC.24)

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Daerah																	
1. Belanja Tidak Langsung	-	-	-	3,827,923,915	1,668,129,187	-	-	3,790,054,742	3,763,121,552	1,395,928,187	-	-	-	98.31%	83.68%	-129.47%	90.99%
a. Belanja Pegawai	-	-	-	3,799,923,915	1,105,940,000	-	-	3,351,828,844	3,735,121,552	921,625,500	-	-	-	98.29%	83.33%	-243.59%	90.81%
b. Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belanja Langsung	731,800,000	750,000,000	1,059,325,000	802,875,000	643,689,187	-	-	960,719,898	794,712,539	555,803,469	-	-	90.69%	98.98%	86.35%	-6.26%	92.01%
a. Belanja Pegawai	-	-	95,400,000	81,600,000	81,500,000	-	-	95,400,000	81,600,000	81,500,000	-	-	100%	100%	100%	-8.52%	100%
b. Belanja barang dan Jasa	-	-	533,925,000	693,275,000	562,189,187	-	-	438,225,898	685,112,539	474,303,469	-	-	82.08%	98.82%	84.37%	-0.17%	88.42%
c. Belanja Modal	-	-	430,000,000	28,000,000	-	-	-	427,094,000	28,000,000	-	-	-	99.32%	100%	-	-	99.66%

Tabel T-C.24 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto antara tahun 2016 s/d 2021 diatas 95 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran Kecamatan Pasilambena sudah sangat baik.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Pasilambena**

Analisis terhadap :

- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 - 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 - 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ...

Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032.

- KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);
4. Jasa pendukung (supporting).

#### **2.4.1.1 Tantangan**

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diuraikan beberapa tantangan yang dihadapi

Kecamatan Pasilambena dalam penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

a. Terbatasnya Sumberdaya Aparatur

Tuntun pelayanan yang prima kepada masyarakat yang dewasa ini semakin beragam dengan kualitas tuntutan pelayanan yang prima, hal ini harus mendapatkan dukungan personil/staf yang memadai. Keterbatasan sumberdaya di internal Kantor Kecamatan Pasilambena menjadi salah satu kendala yang dari tahun ke tahun harus mendapatkan perhatian tersendiri.

b. Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi Antar Pulau

Sebagai kecamatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 8 buah pulau, ketersediaan sarana transportasi antar pulau merupakan suatu keniscayaan. Selama ini, sebagai akibat terbatasnya sarana transportasi antar pulau, khususnya dari dan ke ibukota kabupaten, menyebabkan apar pemerintah yang bertugas di Kecamatan Pasilambena namun berdomisili dari daratan Selayar terkadang mengakibatkan lalai menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan di Kecamatan Pasilambena, perlu ditingkatkan ketersediaan sarana transportasi dari pulau

guna mendukung aksesibilitas arus barang, jasa dan penumpang dari dan ke wilayah Kecamatan Pasilambena.

c. Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem

Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasilambena. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasilambena secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

d. Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah

Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tingkat pendidikan pencari kerja yang berbanding lurus dengan kualitas ketenagakerjaan yang rendah. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang relative rendah. Juga dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang masih relative rendah.

e. Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun Laut Belum Optimal

Sebagai kecamatan dengan wilayah kepulauan dimana perairan menjadi

dominan dengan potensi yang sangat besar. Kekurangan armada penangkapan ikan yang itupun yang ada masih bersifat tradisional ditambah lagi jangkauan pemasaran dengan armada pengangkutan hasil perikanan yang terbatas menyebabkan potensi perikanan dan kelautan menjadi hal yang kurang menarik bagi masyarakat Kecamatan Pasilambena. Potensi pertanian pun yang merupakan potensi sumberdaya alam di darat juga tidak optimal dalam pengelolaannya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa transportasi dan pengelolaan subsistem yang hanya menjadikan pertanian untuk kebutuhan pemenuhan

#### **2.4.2 Peluang**

Sebagaimana pada setiap tantangan maka aka nada peluang yang bisa menjadi potensi pengembangan, berikut adalah potensi yang dapat dikembangkan menjadi peluang yang dimiliki Kecamatan Pasilambena :

- a. Peluang pengembangan pembangunan dari Restra K/L, RTRW, KLHS, Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang selayar dengan perencanaan pengembangan di wilayah Kecamatan Pasilambena, khususnya pada sektor kemaritiman dan kerjasama antar wilayah dimana posisi Kecamatan Pasilambena berbatas langsung dengan 2 provinsi.
- b. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar global.

Untuk produk perkebunan, kopra memiliki peluang yang sangat baik, hal ini dibuktikan dengan harga kopra yang berasal dari Pasilambena mendapat harga yang tertinggi di pedagang besar Ibukota Kabupaten. Demikian pula dengan jambu mente.

- c. Tersedia SDM ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja yang menggunakan aktifitas fisik yang kuat yang cukup tersedia.
- d. Letak wilayah di tenggara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.
- e. Terdapat beberapa pulau dengan potensi kepariwisataan yang sangat potensial untuk dikembangkan baik secara local maupun global. Potensi keindahan pulau kecil yang dapat dikembangkan untuk paket pariwisata, factor kedekatan perairannya dengan Bali dan Lombok dapat dimanfaatkan secara optimal.
- f. Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021 - 2026 yang akan menjadikan wilayah laut sebagai basis potensi ekonomi daerah dimana dalam area poros maritim letak Kepulauan Selayar yang berada di pertengahan wilayah Republik Indonesia, dapat dikembangkan menjadi pusat distribusi barang ke wilayah timur Indonesia.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN PASILAMBENA**

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya.

Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan Daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

### 3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasilambena

Kecamatan Pasilambena yang merupakan kecamatan kepulauan dengan wilayah perairan yang cukup luas dimana terdapat 2 desa yang terletak di 2 pulau yang terpisah dengan kondisi perairan yang sangat tergantung pada kondisi cuaca, dimana hal ini menjadi kendala yang cukup berarti ditambah dengan kendala telekomunikasi yang tidak tercakup sinyal GSM. Pemerintah Kecamatan Pasilambena menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal optimalisasi pelayanan kepada masyarakat membutuhkan upaya yang maksimal dan sungguh-sungguh agar pelayanan yang diberikan tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat secara menyeluruh dengan kualitas pelayanan prima yang optimal.

abel 3.1 Permasalahan pelayanan (TB.35)

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih lemahnya koordinasi dengan Desa/Kelurahan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah	Kebijakan dan arah pembangunan Pemernintah Daerah yang belum tersampaikan dengan baik dan belum dipahami secara mendasar	Desa tidak bertanggung-jawab secara langsung ke Camat
			Belum maksilmal koordinasi dalam bentuk rapat yang membahas arah kebijakan pembangunan daerah.

			Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
		Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
			Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang limpahkan/diberikan
<b>2</b>	Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor kecamatan Desa dan kelurahan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum maksimal	keterbatasan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan peningkatan pelayanan masyarakat	Keterbatasan jumlah pegawai untuk memenuhi rasio pelayanan yang ideal
			Saran pelayanan yang belum optimal dan cenderung masih masih konvensional sehingga memerlukan waktu pelayanan yang lebih lama

3	Belum Optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah	Tingkat pendidikan dan ekonomi	Pembangunan yang masih menjadikan masyarakat sebagai obyek (fisik) yang seharusnya perimbangan sebagai subyek (peremberdayaan) yang ideal
			Hasil pebangunann yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun keberdayaan masyarakat untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonomi
		Optimalisasi bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat dimana - Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat	Data yang belum sempurna dan terkesan seadanya dan terkesan keperpihakan dalam penyaluran dan pemanfaat bantuan yang disalurkan.
			Belum optimalnya penyaluran rastra, PKH, bantuan keagamaan kepada

		(rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	masyarakat desa
			Sosialisasi bahwa tidak sepatasnya terus-menerus merima bantuan.
		Usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten yang belum terakomodir dengan seksama	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa dan kecamatan
			Tingkat keterserapan usulan yang prioritas di desa ke dalam prioritas anggaran kegiatan
<b>4</b>	Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi masyarakat dan pemerintah Desa/kelurahan dan kecamatan	Peran Lembaga Kemasyarakatan yang belum dipandang sebagai suatu institusi pernting	Pembinaan secara berkelanjutan yang masih sangat perlu ditingkatkan
			Keberadaan lembaga masih berupa serimonial pelengkap hanya saat ada kepentingan sesaat saja

Tabel 3.2 Identifikasi dan Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pasilambena

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpersta si: Belum Tercapai ( $<$ ) Sesuai ( $=$ ) Melampaui ( $>$ )	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan aparatur pemerintah dan lemabaga kemasyarakatan dalam rangka reformasi birokrasi			
	❖ Jumlah RW tertib administrasi	$<$	SDM aparatur desa yang masih kurang dan kurang berkelanjutannya pembinaannya	-
	❖ Data dan materi lingkup pemerintahan yang tersusun ( profil kecamatan dan	$=$	Dukungan data profil desa yang terbatas	Update data profil yang sudah tersedia sebelumnya

	tipologi)			
	❖ Pembinaan Desa (Desa terbaik)	<	Orientasi pembangunan desa yang masih harus diselaraskan dengan visi misi pemerintah daerah	
	❖ SOP bidang pemerintahan yang tersusun	=		Dokumen SOP yang sudah tersedia sebelumnya
2	Meningkatkan kapasitas organisasi melalui pengembangan budaya kerja dan menerapkan system manajemen kinerja			
	❖ SOP bidang administrasi umum , kepegawaian, program dan pengelolaan keuangan	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Analisis Tupoksi, analisis beban kerja, dan analisis jabatan tersusun	=		Dokumen yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ % PNS yang mendapat	=		Pembinaan

	hukuman disiplin			dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
	❖ Rata-rata tingkat kehairan PNS dalam setahun	<		Pembinaan dilakukan dengan cara humanis dan konstruktif
3	Meingkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan umum terdapat masyarakat			
	❖ % wajib KTP yang memiliki KTP	<	Masyarakat belum sepenuhnya bernaggapan bahwa dokumen kependudukan adalah hal yang sangat penting	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ Indeks kualitas masyarakat			
	❖ Jumlah SOP bidang pelayanan masyarakat yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
4	Meningkatkan kualitas kehidupan			

	kemasyarakatan melalui kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat serta meningkatkan kerukunan beragama dan kebangsaan masyarakat			
	❖ Terbinanya kader Posyandu dan PKK	=		Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa dan petugas Posyandu
	❖ % sekolah yang menerapkan UKS	=		Menjadi prioritas di sekolah
	❖ Jumlah insiden akibat konflik agama	=		Sosialisasi berkelanjutan dari semua pihak yang berkepentingan
	❖ Jumlah rumah ibadah yang berfasilitas mendapat bantuan	=	Ketersediaan pendanaan	Sosialisasi berkelanjutan dari aparatur desa
	❖ SOP lingkup pendidikan yang tersusun			

5	Meningkatkan aktifitas UKM, produk unggulan kecamatan, koperasi, dan BKM binaan			
	❖ Jumlah UKM yang aktif	<	Kegiatan pelatihan yang sangat terbatas	Potensi sumber daya alam yang tersedia
	❖ Jumlah Koperasi aktif	0		
	❖ SOP bidang EKBANG tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
	❖ Jumlah program kemitraan yang terjalin	<	Akses informasi terbatas karena keterbatasan jarak	Dukungan pemerintah desa dalam membangun UKM di desanya
6	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air, udara, dan tanah, dan pengelolaan sampah dengan 3 R (reduce, Reuse, Recycle)			
	❖ Jumlah pohon yang ditanam di kecamatan	0	Keterbatasan lahan	
	❖ Jumlah kawasan	0	Keterbatasan	

	konservasi laut kecamatan (KKLK) yang dikelola		lahan	
	❖ SOP bidang lingkungan hidup yang tersusun	=		SOP yang sudah tersedia sebelumnya
7	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan budaya tertib dan aman dalam kehidupan bermasyarakat			
	❖ % penurunan pelanggaran K3	=	Tingkat kesadaran hukum yang masih relatif kurang	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal logging	=	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata pencaharian yang relatif rendah	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait
	❖ % penurunan illegal fishing	<	Tingkat pemahaman dan keterbatasan mata	Sosialisasi berkelanjutan dari pihak terkait

			pencaharian yang relatif rendah	
	❖ SOP bidang ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun			SOP yang sudah tersedia sebelumnya

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi

Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

**“ Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.**

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub)

perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Berdasarkan rumusan strategi dan arah kebijakan, maka ditarik beberapa prioritas yang menjadi factor pendorong pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, yang kemudian diturunkan ke Program Pembangunan Daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Untuk mengantar pada penajaman Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, berikut dijelaskan pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
  - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
  - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
  - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
  - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
  - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa :

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
  - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
  - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
  - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
  - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan
2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
  - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
  - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
  - d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
  - e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
  - f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
  - g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa :

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus ( KEK ) pariwisata.
  - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
  - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
  - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
  - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
  - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan

Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa:

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
  - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
  - c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
  - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
  - e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbangsari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbangsari.

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing

Misi ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026, yaitu:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa, dan segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan menjadi tujuan, dengan sasaran utama meningkatkan klasifikasi dan kualifikasi desa menjadi desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

### **3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD**

#### **Provinsi Sulawesi Selatan**

##### **3.3.1 Telaah Renstra K/L Kemantrian Dalam Negeri**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 terdapat peluang untuk pemanfaat pembagunan kewilayahan, khususnya penegasan batas wilayah yang berbatas dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam renstra K/L terdapat program-program yang dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi kewilayahan, salah satu program yang ada adalah Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dan Desa dan program-program lainnya yang arahnya untuk meningkatkan kualitas birokrasi.

Namun faktor yang menjadi kendala adalah koordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang masih sangat kurang. Pun pada ditjen lainnya yang masih sangat memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas administrasi birokratif daerah khususnya Kecamatan Pasilambena.

### **3.3.2 Telaah Renstra perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2018 - 2023, memuat Renstra Sekretariat Daerah. Sebagai refensi untuk membuka peluang peningkatan reformasi birokrasi pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Peluang yang terbuka adalah pemanfaatan peluang untuk membuka kerja sama dengan daerah lain untuk membuka peluang kerjasama yang bernilai ekonomi yang tinggi.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.**

### 3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan kewilayahan Kabupaten Kepulauan Selayar merujuk pada kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penetapan wilayah ruang kabupaten. Terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 201.. Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan arahan tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan wilayah ruang kabupaten. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan;
- c. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana

- d. Pemantapan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Laut Takabonerate, hutan lindung, kawasan lindung, cagar alam laut dan lain-lain;
- e. Pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata;
- i. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional; dan;
- j. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional;
- k. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten;
- l. Pengembangan aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

1. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan keterpaduan sistem perkotaan dan perdesaan, terdiri atas :
  - a. Mengembangkan perkotaan utama sebagai pusat pelayanan di Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng dan Pamatata,
  - b. Mendorong dan mempersiapkan pengembangan kawasan perkotaan Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL Promosi (PKLp) yang pada saatnya dapat disetarakan dengan PKL;
  - c. Menjalin kerjasama dengan perkotaan di kabupaten lainnya yang berbatasan untuk menunjang dan mempercepat perkembangan sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - d. Mendorong pengembangan Perkotaan Benteng, Pamatata, Kayuadi dan Bonerate sebagai PKL dan PKLp dalam sistem perkotaan secara nasional.
  - e. Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;
  - f. Mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
  - g. Mengembangkan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhierarki.

2. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan aksesibilitas jaringan transportasi kepulauan, terdiri atas :
  - a. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah pelayanan;
  - b. Mengembangkan integrasi sistem intermoda dan perpindahan antar moda di seluruh wilayah kepulauan;
  - c. Mengembangkan rute-rute pelayanan moda transportasi publik menjangkau seluruh wilayah kepulauan sesuai dengan intensitas aktivitas; dan
  - d. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas layanan terminal umum, bandara, pelabuhan, dan pelabuhan penyeberangan sebagai simpul transportasi;
3. Strategi pelaksanaan kebijakan pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana, terdiri atas :
  - a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
  - b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai

- kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman (kawasan); dan
- c. Menyusun program dan membangun berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya.
4. Strategi pelaksanaan kebijakan pemantapan fungsi kawasan lindung, terdiri atas :
- a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. Menyusun dan melaksanakan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan lingkungan yang berfungsi lindung;
  - c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
  - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber keanekaragaman hayati; dan
  - e. Memfasilitasi kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan yang berfungsi lindung.
5. Strategi pelaksanaan kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang ramah lingkungan guna mendorong pengembangan ekonomi wilayah, terdiri atas :

- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan biota laut dan lain-lain;
  - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat / hutan hak; dan
  - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (renewable energy).
6. Strategi pelaksanaan kebijakan peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, terdiri atas :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
  - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
  - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan

- d. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, terdiri atas :
    - a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
    - b. Mengembangkan penelitian dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir; dan
    - c. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
  8. Strategi melaksanakan pengembangan pusat kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI dan pendukung perminyakan di Pamatata, terdiri atas :
    - a. Melakukan perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara lintas sektor;

- b. Memprioritaskan program jangka pendek (quick win) yang mampu memberikan efek berantai (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat; dan
  - c. Menerapkan sistem pembiayaan oleh pemerintah dan swasta.
9. Strategi pelaksanaan pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan industri pengolahan perikanan di Benteng,
  - b. Mengembangkan budidaya perikanan berwawasan lingkungan, dan
  - c. Mengembangkan industri perikanan terpadu dengan memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan sinergi di kawasan regional.
10. Strategi pelaksanaan pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional, terdiri atas :
- a. Mengembangkan ekowisata bahari di Kawasan Takabonerate.
  - b. Mengembangkan wisata pantai dan bahari di Pulau Selayar dan sekitarnya.
  - c. Melibatkan tokoh masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
  - d. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan home-stay, desa wisata dan paket wisata lainnya.

11. Strategi pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melibatkan potensi lokal SDM untuk mendukung peningkatan aspek bahari dan maritim di wilayah kabupaten, terdiri atas :
  - a. Meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat kegiatan di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau di wilayah Kabupaten Selayar dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
  - b. Mendorong perkembangan kawasan dengan membuka akses transportasi bagi daerah yang terisolir;
  - c. Meningkatkan kemampuan kawasan yang memiliki sektor unggulan pertanian untuk mencukupi kebutuhan di kawasannya sendiri serta memenuhi kebutuhan wilayah yang bertetangga;
  - d. Meningkatkan pemasaran komoditas lokal yang didukung oleh akses transportasi yang memadai;
  - e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan ekonomi di wilayah pesisir;
  - f. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai penyedia pelayanan jasa dan pusat kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan pelayanan dalam sektor kelautan dan perikanan dan kegiatan masyarakat di sepanjang pantai;
  - g. Meningkatkan penyediaan akses transportasi dari Pulau-Pulau tetangga

dan dari Pulau-Pulau kecil terluar menuju pusat-pusat kegiatan;

- h. Meningkatkan daya tarik pusat kegiatan di sepanjang pesisir pantai dengan keunikan keadaan geografis alam tropis, kondisi sosial budaya masyarakat nelayan dan kondisi khas lingkungan sekitar di kawasan pesisir pantai sehingga menarik wisatawan dan menjadikan kawasan sebagai daerah tujuan yang menarik dikunjungi wisatawan.
12. Peningkatan fungsi aspek pertahanan dan keamanan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten, terdiri atas :
- a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - c. Mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan budi daya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun;
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Strategis Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KLHS menggunakan salah satu metode untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

- Jasa penyediaan (provisioning);
- Jasa pengaturan (regulating);
- Jasa budaya (cultural);
- Jasa pendukung (supporting).

#### **4.1. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari hasil telaah berbagai dokumen strategis sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai isu strategi yang dikelompokkan ke dalam isu strategis hasil analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan

kelemahan serta isu strategis hasil analisis lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan.

## 1. Analisis Lingkungan Internal

### a. Kekuatan

- ❖ Komitmen Camat beserta jajaran pemerintahan pada tingkat kecamatan dan desa dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
- ❖ Wilayah kerja kecamatan yang luas dengan potensi sumber daya alam yang melimpah baik potensi yang ada di darat maupun potensi kelautan. Khusus untuk potensi kelautan yang sangat dominan dan potensial untuk dikembangkan.
- ❖ Potensi pengembangan sektor pariwisata yang prospektif terutama pengembangan pulau-pulau kecil yang salah satunya adalah Pulau Kakabia, Pulau Karumpa Kecil, Pulau Kaju Pangnga' Besar dan Pulau Kaju Pangnga' Kecil serta keluasan area terumbu karang yakni Taka lambena yang berada di wilayah Kecamatan Pasilambena.

### b. Kelemahan

- ❖ Terbatasnya ketersediaan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas.
- ❖ Lemahnya intensitas dan kualitas koordinasi baik antar bidang, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun desa yang berorientasi pada pengembangan potensi kelautan juga potensi perkebunan dll.

- ❖ Masih terbatasnya fasilitas kerja.
- ❖ Alokasi anggaran kecamatan yang relative masih rendah jika dibandingkan dengan luas wilayah, beban, dan volume kerja serta resiko dalam melaksanakan tugas kedinasan.
- ❖ Kualitas SDM masyarakat yang relative rendah yang disebabkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan secara umum.

## 2. Analisis Lingkungan Eksternal

### a. Peluang

- ❖ Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.
- ❖ Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.
- ❖ Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).
- ❖ Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.

## b. Tantangan

- ❖ Kondisi geografis Kecamatan Pasilambena yang wilayahnya sebagian besar adalah laut yang terdiri atas beberapa pulau. Akses yang relative sulit baik dalam hubungannya dengan Ibukota Kabupaten maupun hubungan antar pulau-pulau yang ada dalam wilayah Kecamatan Pasilambena yang hal ini juga tergantung pada kondisi cuaca.
- ❖ Insfrastruktur Kelistrikan Yang Belum Memadai. Pemenuhan energy listrik bagi kebutuhan rumah tangga di Kecamatan Pasilambena sudah dilalukan melalui listrik yang disediakan pemerintah namum daya yang masih terbatas
- ❖ Masih terbatasnya layanan infrastruktur dasar, meliputi : kesehatan, pendidikan, jalan, listrik, air bersih, gudang produksi, pangan, dan infrastruktur kelautan.
- ❖ Sistem Pertanian Masyarakat Yang Masih Relative Bersifat Subsistem
- ❖ Kegiatan perekonomian yang berbasis hanya pada pemenuhan kebutuhan keluarga mendominasi kegiatan pertanian di Pasilambena. Hal ini berimbas pada pertanian yang menggerakkan perekonomian Kecamatan Pasilambena secara umum. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan transportasi untuk pemasaran hasil pertanian. Moda transportasi yang ada dengan moda transportasi rakyat yang relative tradisional dengan biaya ekonomi yang relatif mahal berimbas langsung

pada pendapatan masyarakat dengan margin keuntungan yang juga relative kecil.

Tabel 3.3. Pembobotan isu-isu strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Komitmen Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam membangun dan mengembangkan wilayah kepulauan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan secara menyeluruh dan merata sesuai dengan visi misi yang berfokus pada kemaritiman.	30
2	Nilai ekonomis komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang relative tinggi di pasar regional, nasional, maupun global.	25
3	Potensi investasi yang relative besar dan prospektif terutama di sektor perdagangan (distriusi barang), perikanan dan pariwisata (bahari).	25
4	Letak wilayah di tenggara yang berbatas langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini bisa dikembangkan menjadi gerbang perdagangan barang dan jasa.	20
		100

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian visi dan masing-masing misi. Sementara sasaran adalah target atau hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 yang kemudian diimplementasikan dalam Renstra Kecamatan Pasilameban 2021 – 2026 yang dirumuskan berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, memiliki tujuan pembangunan :

a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran berikut ini :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat
- 2) Meningkatnya Nilai SAKIP
- 3) Sesuainya SAP

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan, memiliki tujuan:

a. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, dengan sasaran berikut ini :

- 1) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Misi 5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, memiliki tujuan pembangunan:

a. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan, dengan sasaran berikut ini :

- 1) Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial
- 2) Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Pasilambena tahun 2022 – 2026 sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran dan Sasara Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena.**

**Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (M-1)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.5%	72.7%	75.2%	80.2%	85.2%
		Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kecamatan	60,2	65,2	70.2	75.2	80.0
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Sesuai Standar Akutansi Pemenitahan	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai
2.	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan (M-2)	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	% Meningkatkan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa	% Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan (M-5)	Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	0,6950	0,7050	0,7150	0,7200	0,7200
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Angka Kriminalitas	9,50	8,50	8,00	7,20	6,25

**Tabel 4.2 Perubahan Tujuan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pasilambena**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	59,2	60,2	65,2	70,2	75,2	80,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasilambena	72,7	74,9	75	77,2	79,4	80,6
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	0	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
Meningkatkan Upaya Pelestarian Nilai nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan	Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasilambena	Meningkatnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat	Tingkat Solidaritas Sosial di Kecamatan	0	67,14	73,14	76,14	78,14	80,14
Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang dikoordinasikan	60,2	62,5	72,5	77,5	80	80,5
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan di Kecamatan Pasilambena	Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasilambena	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100
			Tingkat Toleransi Kecamatan	0	86,98	88,14	90,14	92,14	94,14

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Pasilambena adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah. Strategi dan kebijakan Kecamatan Pasilambena diselaraskan dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD 2021 - 2026.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Pasilambena menjadi dasar perumusan kegiatan serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena.

#### **A. Strategis**

Strategi yang akan dilakukan yang terdapat dalam Misi1, 2 dan 5 dalam RPJMD periode 2022 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku
4. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha Di Perdesaan
6. Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia

## **B. Kebijakan**

Untuk mendukung terwujudnya visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2022 – 2026, adalah :

1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur
2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur.
3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari.
4. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
5. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat.
6. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

**Tabel 5.1. Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Meningkatkan Kapabilitas dan Keunggulan SDM Aparatur yang Ditunjang Perangkat Teknologi yang Baik.	1. Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Sarana dan Parasana Aparatur
		2. Meningkatnya Nilai SAKIP	1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan yang Berorientasi Pencapaian Hasil	
		3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berdasarkan Perundang-Undangan yang Berlaku	
2	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Mengoptimalkan Koordinasi Stakeholder Dalam Rangka Peningkatan Produktifitas Masyarakat Perdesaan Dan Kualifikasi Desa	1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Gerbang Sari

		2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	1. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal Dalam Rangka Mengembangkan Lapangan Kerja Dan Lapangan Usaha di Pedesaan	1. Meningkatkan Koordinasi Dengan Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dalam Gerbang Sari
3	Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan	1. Meningkatnya upaya pelestarian kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial 2. Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	Meningkatkan Peran Lembaga Sosial Dan Lembaga Keagamaan Dalam Pembangunan Manusia	1. Koordinasi dan Fasilitasi Pengintegrasian Tradisi Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Kedalam Setiap Aktivitas Masyarakat. 2. Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

**Tabel 5.2. Perubahan Tujuan , Sasaran, Strategis, dan Kebijakan**

No	Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Disiplin dan Sumber Daya Aparatur  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2	Meningkatkan Upaya Pelestarian Nilai nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan	Meningkatnya Tatahan Kehidupan Sosial Masyarakat	Menyediakan Sarana Prasarana yang Mendukung Pembinaan Keaneka Ragaman seni dan Budaya Melestarikan Adat Istiadat dan Budaya yang Heterogen dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika
3	Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mengkoordinasikan Kegiatan Pembangunan Desa yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Gerbang Sari

			Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintahan Desadalam Mengembangkan Sumber Daya Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Gerbang Sari
4	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan di Kecamatan Pasilambena	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Koordinasi dan Pengintegrasian Tradisi dan nilai- nilai Kearifan Lokal Ke dalam Setiap Aktifitas Masyarakat
			Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan

Kecamatan Pasilambena sebagai perangkat daerah yang mempunyai urusan kewilayahan sebagaimana yang Permendagri 90 Tahun 2019 yang telah menetapkan nomoeklatur kegiatan dan subkegiatan. Hal ini secara focus menjadi kekuatan untuk mendukung sepenuhnya untuk dapat mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2022 – 2026 yang tertuang dalam 3 Pilat dan 1 program unggulan Gerbang Sari;

1. Pembangun Disribusi Logistik (PDL).

Keberadaan dermaga pelabuuan di Kawawu Kecamatan Pasilambena adalah fasilitas mendukung dari terjalannya distribusi logistic. Sebagaimana telah dicanangkan bahwa Kecamatan Pasilambena termasuk dalam kawasan penyangga distribusi logistik. Hal ini juga menjadi sebuah keuntungan bagi mendistribusian hasil-hasil pertanian dan hasil perikanan dan kelautan.

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Kondisi geografis Kecamatan Pasilambena yang merupakan kecamatan kepulauan, dimana terdiri dari pulau-pulau yang mempunyai potensi keindahan tersendiri yang dapat dikembangkan menjadi insdustri pariwisata. Letak Kecaamatan Pasilambena yang berbatasan dengan langsung dengan 2 provinsi, pun menjadi keuntungan dan potensi yang baik untuk dikembangkan secara serius. Kecamatan Pasilambena pun menjadi kawasan penyangga pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata seperti yagn telah dicanagkan. Rangkaian pulau-pulau kecil yang memiliki keindahan dan nilai tambah tersendiri, sebut saja salah satunya adalah Pulau Kakabia yang dapat dikembangkan emnjadi industry pariwisata ekologi konservasi satwa unggas dan konserasi kelautan.

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT).

Sebagai Kecamatan Kepulauan sudah tentu potensi perikanan mempunyai potensi yang sangat besar. Bisa disebut bahwa wilayah kelautan Kecamatan Pasilambena adalah raksasa perikanan yang masih tidur. Ketika sentuhan pembangunan yang berkelanjutan dan dikelola dengan baik, maka geliat perikanan di wilayah ini akan sangat membantu industri perikanan. Sebagai kawasan penyanggah, maka potensi perikanan Kecamatan Pasilambena sangat menanti sentuhan pengelolaan yang serius.

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri.

Secara umum semua desa di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah objek program unggulan ini yang sekaligus menjadi subjek untuk membangun kemandiriannya. Potensi-potensi desa akan semaksimal mungkin dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat. Orientasi pemberdayaan dimana program pembangunan diarahkan untuk masyarakat desa sendiri yang mengatur dan membangun kebutuhan sarana dan prasarannya.

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau disingkat Gerbang Sari ini secara psikologis adalah program yang membangun manusia atau masyarakat atau keberdayaannya dapat menjadi subjek yang menggerakkan diri untuk menuangkan partisipasinya dalam membangun dan mengawal pembangunan di wilayahnya. Hal ini diharapkan agar arah pembangunan masyarakat sendiri yang melaksanakan dan mengawasinya karena yang lebih mengerti kebutuhannya adalah mereka sendiri

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN**  
**KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Maka Program Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan sumber dana APBN/APBD.

Program dan Kegiatan dimaksud hanya program dan kegiatan lokalitas kewenangan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara terperinci disajikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan administrasi, penataan kepegawaian dan administrasi keuangan secara efektif dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasilambena di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan/subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
- C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
  - c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- E. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### UNSUR KEWILAYAHAN

### 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan bagi aparatur dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pendukung terlaksananya pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;
  - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- B. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

b.

### **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah desanya. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu :

Kegiatan :

#### **A. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

c. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

### **4. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

Kegiatan :

#### **A. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;**

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

- b. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

#### 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dimaksudkan untuk terselenggaranya urusan pemerintahan secara umum yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pasilambena. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah;
  - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - b. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
  - c. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

#### 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan fasilitasi dan melakukan pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa, baik dari segi pengelolaan pemerintahan, pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, pembangunan kawasan, dan demikian pula dengan pula badan permusyawaratan desa. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan / subkegiatan yaitu :

- A. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
  - a. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
  - b. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
  - c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
  - d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
  - e. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
  - f. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - g. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
  - h. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  - i. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Tabel. 6.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Tabel 6.1. ( TC.27 ) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena 2022 – 2026  
Kabupaten Kepulauan Selayar**

No.	Tujuan	Sasaran	KODE	Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi						
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra					
							2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp. (000.000)				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18	19	20	21	22			
			x.xx.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Presentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota	100%		100%	1,402,496,336	100%	1,421,696,511	100%	1,457,281,575	100%	1,492,241,759	100%	1,527,846,648	100%	1,527,846,648					
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatkan Nilai SAKIP	x.xx.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<b>14,300,000</b>															
			x.xx.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dok														Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena		
			x.xx.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1 dok	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
			x.xx.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA	1 dok	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
			x.xx.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan	1 dok	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena

					Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA																
2,500,000					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	1 dok	1 dok	2,500,000	1 dok		Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lap	3 lap	4,300,000	3 dok	4,300,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	lap														
	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Daerah				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen dan Administrasi Keuangan yang disusun			<b>1,130,375,000</b>												
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 orang/bulan	9 org/bln	1,115,000,000	9 org/bln	1,115,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Dokumen	dok												

				Tugas ASN																
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	dokumen	dok													
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	dokumen	dok													
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1 lap	6,625,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena										
				Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	dok													
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	1 laporan	1 lap	8,750,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena										
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	dok													



	kat terhadap pelayana n				Kapasitasnya																
		x.xx.01. 2.05.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit															
		x.xx.01. 2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	9 pake t														Kec. Pasil amb ena
		x.xx.01. 2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokum en	dok														
		x.xx.01. 2.05.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi kepegawaian	dokum en	1 dok	5,000, 000.0	1 dok	5,000, 000.0	1 dok	5,000, 000.0	1 dok	5,000, 000.0	1 dok	5,000, 000.0	1 dok	5,000, 000.0	Kec. Pasila mbena	Kec. Pasil amb ena	
		x.xx.01. 2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokum en	dok														
		x.xx.01. 2.05.06		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	orang	org														
		x.xx.01. 2.05.07		Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	lapora n	lap														
		x.xx.01. 2.05.08		Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugas kan	orang	org														
		x.xx.01. 2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	orang	org														Kec. Pasila mbena



				undangan	Perundang-Undangan yang Disediakan															
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket														
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1 dok	20,000,000	1 dok	20,700,000	1 dok	21,500,000	1 dok	23,000,000	1 dok	23,000,000	1 dok	23,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	laporan	1 lap	169,500,000	1 dok	169,500,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	dokumen	dok													
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	dokumen	dok													
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia															
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	unit													
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	unit													
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	unit												Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena



				Kantor yang Disediakan															
x.xx.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1 lap	166,000,000	1 lap	166,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
x.xx.01.2.09.			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah barang Milik daerah yang Dipelihara			<b>27,000,000</b>		<b>27,150,000</b>		<b>27,301,500</b>		<b>27,454,000</b>		<b>27,609,060</b>				
x.xx.01.2.09.05			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	unit													
x.xx.01.2.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	9 unit	15,000,000	9 unit	15,150,000	9 unit	15,301,500	9 unit	15,454,515	9 unit	15,609,060	9 unit	15,609,060	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
x.xx.01.2.09.07			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit	2 unit	12,000,000	2 unit	12,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena								
x.xx.01.2.09.08			Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	unit	unit													
x.xx.01.2.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	unit	unit												Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
x.xx.01.2.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	unit	unit													
x.xx.01.2.09.11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	unit	unit													

			x.xx.01. 2.09.12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	Ha														
			x.xx.01. 2.10.		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Jumlah badan Layanan Umum Daerah																
			x.xx.01. 2.10.01		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit kerja															
			7	UNSUR KEWILAYAHAN																		
			7.01	KECAMATAN																		
			7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>		Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 menit	30 menit	19,000,000	25 menti	19,260,110	20 menit	19,742,191	20 menit	20,215,806	20 menit	20,698,155	15 menit	20,698,155			
			7.01.02. 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>		Jumlah dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan																
			7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	lap														
			7.01.02. 2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	dok														

			7.01.02.2.02.		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Pemerintahan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Perangkat Daerah			9,000,000		9,090,000		9,180,900		9,272,709		9,365,436				
			7.01.02.2.02.01		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	dokumen	dok													
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa	7.01.02.2.02.02		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	laporan	1 lap	9,000,000	1 lap	9,090,000	1 lap	9,180,900	1 lap	9,272,709	1 lap	9,365,436	1 lap	9,365,436	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
			7.01.02.2.02.03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	lap													
			7.01.02.2.03.		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Jumlah prasarana dan sarana pelayanan umum yang dipelihara															
			7.01.02.2.03.01		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	dokumen	dok													



	an Masy araka t Perde saan	Masyara kat Desa			Pembangunan di Desa	dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa															
			7.01.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	doku men	2 dok	20,000,000	2 dok	20,000,000	2 dok	20,000,000	2 dok	20,000,000	2 dok	20,000,000	2 dok	20,000,000	Kec. Pasila mbena	Kec. Pasil amb ena
			7.01.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	lapora n	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	1 lap	10,000,000	Kec. Pasila mbena	Kec. Pasil amb ena
			7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		Presentase kasus kriminalitas di tingkat kecamatan (%)		1	16,516,000	1	16,742,104	1	17,161,159	1	17,572,855	1	17,992,143	1	17,992,143		
			7.01.04.2.01.		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		9,00	<b>14,000,000</b>	<b>8,50</b>	<b>14,000,000</b>	<b>8,00</b>	<b>14,000,000</b>	7.20	<b>14,500,000</b>	6.20	14,500,000	6.20			
	Meningkatkan Pembinaan Sosial Dan Keagamaan	Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisaikan pada kehidupan	7.01.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	lapora n	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,500,000	1 lap	7,500,000	1 lap	7,500,000	Kec. Pasila mbena	Kec. Pasil amb ena

		an sosial																					
		Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Keagamaan	7.01.04.2.01.02			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	1 lap	7,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena	
			7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			Presentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan (%)			0	56,000,000	0	56,766,640	0	58,187,509	0	59,583,427	0	61,005,088	0	61,005,088		
			7.01.05.2.01.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>			Jumlah forum koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan				<b>49,000,000</b>		<b>49,450,000</b>		<b>49,904,500</b>		<b>50,363,545</b>		<b>50,827,180</b>				
		Meningkatnya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	7.01.05.2.01.01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	orang	100 org	40,000,000	100 org	40,400,000	100 org	40,804,000	100 org	41,212,040	100 org	41,624,160	100 org	41,624,160	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena	

						Republik Indonesia																
			7.01.05.2.01.02			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	orang	org													
			7.01.05.2.01.03			Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	orang	org													
		Meningkatkannya Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal dengan mengakt	7.01.05.2.01.04			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	orang	50 org	5,000,000	50 org	5,050,000	50 org	5,100,500	50 org	5,151,505	50 org	5,203,020	50 org	5,203,020	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena

		alisasi pada kehidupan sosial)				Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
			7.01.05.2.01.05			Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	laporan	lap													
						Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga masyarakat	lm													
			7.01.05.2.01.07			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	dokumen	dok													
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.05.2.01.08			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	1 dok	4,000,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena										

			7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		Persentase Program pemerintahan desa yang															
						mendukung program pemerintah (%)	100 %	59,000,000	100%	59,807,710	100 %	61,304,697	100 %	62,775,397	100 %	64,273,218	100 %	64,273,218			
			7.01.06.2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa		<b>59,000,000</b>		<b>59,807,710</b>		<b>61,304,697</b>		<b>62,775,397</b>		<b>64,273,218</b>		<b>64,273,218</b>			
			7.01.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	dok													
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	dokumen	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	1 dok	7,620,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
7.01.06.2.01.03				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	dokumen	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	1 dok	7,620,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena	
			7.01.06.2.01.04		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-	laporan	lap													



					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dokumen	1 dok	5,000,000	1 dok	5,000,000	1 dok	5,200,000	1 dok	5,410,000	1 dok	5,410,000	1 dok	5,410,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	dokumen	dok															
	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen	1 dok	7,000,000	1 dok	7,407,710	1 dok	7,904,697	1 dok	8,115,397	1 dok	8,353,218	1 dok	8,353,218	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena		
				Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	dokumen	dok																
				Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	dokumen	1 dok	7,000,000	1 dok	7,000,000	1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	1 dok	7,620,000	1 dok	7,620,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan	dokumen	1 dok																

						Pemberdayaan Masyarakat Desa																
			7.01.06.2.01.17			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	1 lap													
			7.01.06.2.01.18			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di WilayahKecamatan	laporan	1 dok	7,000,000	1 dok	7,400,000	1 dok	7,600,000	1 dok	7,810,000	1 dok	8,020,000	1 dok	8,020,000	Kec. Pasilambena	Kec. Pasilambena
								Sesuai RPJMD		1,163,468,469.00	1,779,396,352.00	1,742,393,464.00	1,867,690,835.00	1,912,253,938.00	1,912,253,938.00							
								Total dengan Gaji		2,565,964,805.00	3,201,092,863.00	3,199,675,039.00	3,359,932,594.00	3,440,100,586.00	3,440,100,586.00							

**Tabel 6.2. ( TC.27 ) Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena 2022 – 2026 Kabupaten Kepulauan Selayar (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan di Kecamatan Pasilambena				Indeks Kesalehan Sosial Kecamatan Pasilambena	0	78,77		79,55		80		81		81,55		81,55		
	Meningkatnya Toleransi Kehidupan Sosial Kemasyarakatan			Tingkat Toleransi Kecamatan	0	86,98		88,14		90,14		92,14		94,14		94,14		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan	0	1	16,516,000	1	16,742,104	1	17,161,159	1	17,572,855	1	17,992,143	1	85,984,261	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Trantibum	100	100	16,516,000	100	16,742,104	100	17,161,159	100	17,572,855	100	17,992,143	100	85,984,261	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	8,516,000	1	8,742,104	1	9,161,159	1	9,572,855	1	9,992,143	5	45,984,261	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	0	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	5	40,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
Mewujudkan Reformasi Birokrasi				Indeks Reformasi Birokrasi	0	70,5		72,7		75,2		80,2		85,2		85,2		
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah			Nilai Sakip Kecamatan	59,2	60,2		65,2		70,2		75,2		80,0		80,0		
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasilambena	72,7	74,9		75		77,2		79,4		80,6		80,6		
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	0	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50.91	63.03	1,402,496,336	70.28	1,421,696,511	70.53	1,457,281,575	71.51	1,492,241,759	72.31	1,527,846,648	72.31	7,301,562,829	KECAMATAN PASILAMBENA
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	83		85		88		91		95		95		

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	23,800,000	100	27,340,005	100	24,171,095	100	24,407,903	100	24,649,903	100	124,368,906	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	9,500,000	0	9,630,005	0	9,871,095	0	10,107,903	0	10,349,903	0	49,458,906	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000	1	2,420,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,420,000	KECAMATAN PASILAMBENA

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (13)
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)			
						(6) K	(7) Rp.	(8) K	(8) Rp.	(9) K	(9) Rp.	(10) K	(10) Rp.	(11) K	(11) Rp.	K	Rp.		
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000	1	2,420,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	12,420,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000	1	4,235,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	14,235,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	2,500,000	1	4,235,000	1	2,500,000	1	2,500,000	1	2,500,000	5	14,235,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	4,300,000	1	4,400,000	1	4,300,000	1	4,300,000	1	4,300,000	5	21,600,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan	100	100	964,296,687	100	1,042,913,931	100	1,013,799,804	100	1,048,523,180	100	1,083,886,069	100	5,153,419,671	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0	1	955,671,687	1	1,036,627,931	1	1,005,174,804	1	1,039,898,180	1	1,075,261,069	5	5,112,633,671	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA	

		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	1	6,625,000	1	4,286,000	1	6,625,000	1	6,625,000	1	6,625,000	5	30,786,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan	100	100	9,800,000	100	12,145,000	100	9,800,000	100	9,800,000	100	9,800,000	100	51,345,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (12)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (13)	
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	4,300,000	1	6,645,000	1	4,300,000	1	4,300,000	1	4,300,000	5	23,845,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	1	1,500,000	5	7,500,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki Predikat Kinerja sangat baik	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	25,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA

		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	25,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Kode (3)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (4)	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) (5)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6) K	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (12) K Rp		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab (13)
						Tahun-1 (2022) (7) K Rp.		Tahun-2 (2023) (8) K Rp.		Tahun-3 (2024) (9) K Rp.		Tahun-4 (2025) (10) K Rp.		Tahun-5 (2026) (11) K Rp.				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	235,709,649	100	183,636,575	100	241,120,676	100	241,120,676	100	241,120,676	100	1,142,708,252	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	2,000,000	1	1,680,000	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	5	9,680,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	5	75,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	20,609,649	1	22,591,575	1	23,020,676	1	23,020,676	1	23,020,676	5	112,263,252	KECAMATAN PASILAMBENA

		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0	1	5,000,000	1	2,560,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	5	22,560,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	3,600,000	1	2,100,000	1	3,600,000	1	3,600,000	1	3,600,000	5	16,500,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	20,000,000	1	24,780,000	1	23,000,000	1	23,000,000	1	23,000,000	5	113,780,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0	1	169,500,000	1	114,925,000	1	169,500,000	1	169,500,000	1	169,500,000	5	792,925,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	98,500,000	100	85,271,000	100	98,000,000	100	98,000,000	100	98,000,000	100	477,771,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0	1	25,000,000	1	15,180,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	115,180,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	13,500,000	1	10,091,000	1	13,000,000	1	13,000,000	1	13,000,000	5	62,591,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	5	300,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								
					K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100	100	65,390,000	100	65,390,000	100	65,390,000	100	65,390,000	100	65,390,000	100	326,950,000	KECAMATAN PASILAMBENA	
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	53,390,000	1	53,390,000	1	53,390,000	1	53,390,000	1	53,390,000	5	266,950,000	KECAMATAN PASILAMBENA	

		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	5	60,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA		
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA		
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA		
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA		
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30	25	19,000,000	20	19,260,110	15	19,742,191	10	20,215,806	8	20,698,155	8	98,916,262	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja di Kecamatan	100	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	9,000,000	100	45,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	5	45,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)	(13)			
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Dokumen Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.02.2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Dokumen Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	100	10,000,000	100	10,260,110	100	10,742,191	100	11,215,806	100	11,698,155	100	53,916,262	100	53,916,262	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	1	10,000,000	1	10,260,110	1	10,742,191	1	11,215,806	1	11,698,155	5	53,916,262	5	53,916,262	KECAMATAN PASILAMBENA
Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan				Indeks Desa Membangun	0,50604	0,6064		0,7064		0,7164		0,7264		0,7364		0,7364		0,7364		
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa			Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang dikoordinasikan	60,2	62,5		72,5		77,5		80		80,5		80,5		80,5		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	100	100	41,700,000	100	42,281,010	100	43,339,304	100	44,379,013	100	45,437,897	100	217,137,224	100	217,137,224	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Dokumen Pemberdayaan Desa	100	100	41,700,000	100	42,281,010	100	43,339,304	100	44,379,013	100	45,437,897	100	217,137,224	100	217,137,224	KECAMATAN PASILAMBENA

		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Masyarakat)	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	0	1	16,000,000	1	16,000,000	1	17,000,000	1	18,000,000	1	19,000,000	5	86,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (6)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	0	15,700,000	0	16,281,010	0	16,339,304	0	16,379,013	0	16,437,897	0	81,137,224	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	KECAMATAN PASILAMBENA
Meningkatkan Upaya Pelestarian Nilai nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial di Kecamatan				Indeks Ketahanan Sosial Kecamatan Pasilambena	0,5950	0,6950		0,7050		0,7150		0,7200		0,7200		0,7200		
	Meningkatnya Tatanan Kehidupan Sosial Masyarakat			Tingkat Solidaritas Sosial di Kecamatan	0	67,14		73,14		76,14		78,14		80,14		80,14		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan	0	0	56,000,000	0	56,766,640	0	58,187,509	0	59,583,427	0	61,005,088	0	291,542,664	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah	100	100	56,000,000	100	56,766,640	100	58,187,509	100	59,583,427	100	61,005,088	100	291,542,664	KECAMATAN PASILAMBENA

		7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	0	1	40,000,000	1	40,000,000	1	41,000,000	1	42,000,000	1	43,000,000	5	206,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
					K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	0	1	8,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	5	43,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	0	1	8,000,000	1	8,766,640	1	8,187,509	1	8,583,427	1	9,005,088	5	42,542,664	KECAMATAN PASILAMBENA

Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan				Indeks Desa Membangun	0,50604	0,6064	1,594,712,336	0,7064	1,616,554,085	0,7164	1,657,016,435	0,7264	1,696,768,257	0,7364	1,737,253,149	0,7364	8,302,304,262	
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa			Persentase urusan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	100	100	1,594,712,336	100	1,616,554,085	100	1,657,016,435	100	1,696,768,257	100	1,737,253,149	100	8,302,304,262	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah	40	100	59,000,000	100	59,807,710	100	61,304,697	100	62,775,397	100	64,273,218	100	307,161,022	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Masyarakat Desa	100	100	59,000,000	100	59,807,710	100	61,304,697	100	62,775,397	100	64,273,218	100	307,161,022	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	35,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	35,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	K Rp.	(13)		
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	0	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	1 7,000,000	5 35,000,000	5 35,000,000	5	KECAMATAN PASILAMBENA	
		7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	KECAMATAN PASILAMBENA	

		7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)	0	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	5	40,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.10	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0	1	9,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000	1	9,000,000	1	10,000,000	5	45,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000	1	8,000,000	1	9,000,000	5	39,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	0	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	5	35,000,000	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBENA
		7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0	1	7,000,000	1	8,807,710	1	8,304,697	1	9,775,397	1	9,273,218	5	43,161,022	KECAMATAN PASILAMBENA
<b>Total</b>							<b>1,594,712,336</b>		<b>1,616,554,085</b>		<b>1,657,016,435</b>		<b>1,696,768,257</b>		<b>1,737,253,149</b>		<b>8,302,304,262</b>	

Tabel 6.3. (TC.27)

**Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Pasilambena 2022 – 2026**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar (Keppmendagri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung- jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				(12)	
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Pasilambena				Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasilambena						68		73		76		76			
Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				Laporan Keuangan Kecamatan Pasilambena sesuai SAP						sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			
				Nilai Sakip Kecamatan Pasilambena						70		75		80		80			
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasilambena						75		80		85		85			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja						100 %	1.563.601.575	100 %	1.563.601.575	100 %	1.563.601.575	100 %	4,690,804,725	KECAMATAN PASILAMBENA	
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan						88		91		95		95			

		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu						1	14,300,000	1	14,300,000	1	14,300,000		42,900,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)						2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)						2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)						1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)						1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	2,500,000	1 dok	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	

		0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)					3 dok	4,300,000	3 dok	4,300,000	3 dok	4,300,000	3 dok	12,900,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)					4	0	4	0	4	0	20	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu					1	1,130,375,000	1	1,130,375,000	1	1,130,375,000	3	3,391,125,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)					14 org/bln	1.221.320.000	14 org/bln	1.221.320.000	14 org/bln	1,115,000,000	14 org/bln		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)					1	0	1	0	1	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					1 lap	6,625,000	1 lap	6,625,000	1 lap	6,625,000	3 lap	19,875,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)					1	,0	1	0	0	0	3	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)					1 lap	8,750,000	1 lap	8,750,000	1 lap	8,750,000	3 lap	26,250,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis/Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu					85	9,000,000	90	10,000,000	95	11,000,000	95	30,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang/Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					<b>1 lapo ran</b>	<b>4,300,000</b>	<b>1 lapo ran</b>	<b>4,300,000</b>	<b>1 lapo ran</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3 lapo ran</b>	<b>12,900,000</b>	KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)					1	0	1	0	1	0	5	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					1 lap	4,300,000	1 lap	4,300,000	1 lap	4,300,000	5	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik					85	30.000.000	90	35,000,000	95	55,000,000	95	170.,000,000	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)					1 dok	5,000,000.0	1 dok	5,000,000.0	1 dok	5,000,000.0	3 dok	15,000,000		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)					1	0	1	0	1	0	4	0		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)					1	0	1	0	1	0	5	0		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)					0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum kantor					85	224,191,575	90	226,120,676	95	226,120,676	95	676,432,927	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)					1 paket	2,000,000	1 paket	2,000,000	1 paket	2,000,000	4	6.000.000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)					2	0	2	0	2	0	8	0	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)					1 paket	22,591,575	1 paket	23,020,676	1 paket	23,020,676	3 Paket	68,632,927	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)					1 paket	5,000,000	1 paket	5,000,000	1 paket	5,000,000	3 paket	1 paket	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)					1 dok	3,600,000	1 dok	3,600,000	1 dok	3,600,000	3 dok	10,800,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	

		0.00.01.2. 06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)					1 dok	21,500,000	1 dok	23,000,000	1 dok	23,000,000	3 dok	67,500,000		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)					1 dok	169,500,000	1 dok	169,500,000	1 dok	169,500,000	13 dok	508,500,000		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah					85	25,000,000	90	49,000,000	95	51,000,000	95	175,000,000		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)					0	0	1	20,000,000	1	22,000,000	2	42,000,000		KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)					4	5,000,000	4	4,000,000	4	4,000,000	20	23,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)					2	20,000,000	2	25,000,000	2	25,000,000	10	110,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					85	225,500,000	90	244,500,000	95	250,000,000	95	1,153,500,000	KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)					12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	48	10,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					12	8,000,000	12	8,000,000	12	8,000,000	60	40,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)					12	215,000,000	12	234,000,000	12	239,500,000	60	1,103,500,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik					85	81,500,000	90	85,500,000	95	90,000,000	95	394,500,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)					7	71,000,000	7	79,000,000	7	80,000,000	35	359,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A

		0.00.01.2. 09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)					6	7,500,000	4	3,500,000	4	5,000,000	16	18,500,000	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)					1	3,000,000	1	3,000,000	1	5,000,000	5	17,000,000	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		0.00.01.2. 09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Pelayanan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan					15	12,468,752	10	12,767,877	8	13,072,519	8	62,473,428	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dikoordinasikan					85	6,000,000	90	6,000,000	95	6,000,000	95	30,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)					1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	15,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)					1	3,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	5	15,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					85	3,468,752	90	3,000,000	95	3,000,000	95	15,633,032	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)					1	3,468,752	1	3,000,000	1	3,000,000	5	15,633,032	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat					85	3,000,000	90	3,767,877	95	4,072,519	95	16,840,396	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)					1	1,000,000	1	1,000,000	1	1,500,000	5	7,500,000	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)					1	2,000,000	1	2,767,877	1	2,572,519	4	9,340,396	KECAMATAN PASILAMBEN A	
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasilambena				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasilambena					0,7000		0,7150		0,7300		0,7300			
	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa			Persentase Peningkatan Fungsi Lembaga Desa yang Dikoordinasikan					70		71		73		73			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan					100	32,730,474	100	33,515,678	100	34,315,362	100	163,992,749	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan					85	32,730,474	90	33,515,678	95	34,315,362	95	163,992,749	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)					7	1,500,000	7	2,000,000	7	2,000,000	35	8,500,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	

		7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)					2	31,230,474	2	31,515,678	2	32,315,362	11	155,492,749	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan													KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarkatan)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang disediakan (Unit)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.05.0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.05.0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.05.0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2.05.0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dokumen)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.03 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bermegara (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.03.2. 06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Ruma	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.03.2. 06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.03.2. 06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

	Meningkatnya tatanan kehidupan sosial masyarakat			Tingkat solidaritas sosial di Kecamatan						71		71,5		71,5		71,5		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kasus Kriminalitas di tingkat kecamatan						1	8,312,501	1	8,511,918	1	8,715,013	1	41,648,952	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dikoordinasikan						90	4,000,000	95	4,000,000	100	4,000,000	100	20,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)						12	4,000,000	12	4,000,000	12	4,000,000	60	20,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)						0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dikoordinasikan						90	4,312,501	95	4,511,918	100	4,715,013	100	21,648,952	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)						12	4,312,501	12	4,511,918	12	4,715,013	60	21,648,952	KECAMATAN PASILAMBEN A
	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Pasilambena			Tingkat toleransi di Kecamatan						67		70		75		75		
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial dan Keagamaan di tingkat kecamatan						0	39,484,381	0	40,431,611	0	41,396,310	0	197,832,522	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang di selenggarakan						90	39,484,381	95	40,431,611	100	41,396,310	100	197,832,522	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.05.2. 01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)						300	34,000,000	300	35,000,000	300	36,000,000	1500	171,000,000	KECAMATAN PASILAMBEN A	
		7.01.05.2. 01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2. 01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2. 01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)						50	5,484,381	50	5,431,611	50	5,396,310	250	26,832,522	KECAMATAN PASILAMBEN A	

		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2.01.0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila (Lembaga Masyarakat)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan Kecamatan Pasilambena				Indeks Desa Membangun Kecamatan Pasilambena					0,700 0	2,022,372,66 1	0,715 0	2,071,889,38 0	0,730 0	2,120,300,80 2	0,730 0	10,132,894,9 07		
	Meningkanya Kualitas Pemerintahan Desa			Persentase Urusan Pemerintahan Desa yang Difasilitasi					100	2,022,372,66 1	100	2,071,889,38 0	100	2,120,300,80 2	100	10,132,894,9 07		
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah					60	61,304,69 7	100 %	62,775,39 7	100 %	64,273,21 8	70	188,353,312	KECAMATAN PASILAMBEN A	

		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan dan Pengawasan yang difasilitasi, direkomendasi, dikoordinasikan					80	61,304,697	80	62,775,397	80	64,273,218	100		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)					1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000			KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)					1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	5		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)					1	0	1	0	1	0	5	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)					0	0	0	0	1	0	2	0	KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)					1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	1 dok	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen)					1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	5		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)					1 dok	5,000,000	1 dok	5,200,000	1 dok	5,410,000	5		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)					1 dok	5,200,000	1 dok	5,410,000	1 dok	5,410,000	5		KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)					1 dok	7,904,697	1 dok	8,115,397	1 dok	8,353,218	5		KECAMATAN PASILAMBEN A

		7.01.06.2.01.0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)					1 dok	7,200,000	1 dok	7,410,000	1 dok	7,620,000	5			KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
		7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PASILAMBEN A
<b>Total</b>										<b>1,730,670,257</b>		<b>1,721,604,056</b>		<b>1,725,373,997</b>		<b>5,177,648,310</b>		

URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
6	1	3	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah
6	1	3	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6	1	3	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1				KECAMATAN			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			

7	1	3	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	1	3	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	1	3	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan
7	1	3	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7	1	2	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan

7	1	2	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	1	2	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen
7	1	2	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	1	2	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
7	1	2	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen

7	1	2	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	1	2	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	Jumlah Dokumen Non PerizinanUsaha yang Dilaksanakan	Dokumen
7	1	2	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	1	2	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	1	3	2.01		Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa			
7	1	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	LembagaKemasyarakatan

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka Kecamatan Pasilambena menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Pasilambena dengan Bupati dan Wakil Bupati, dan Kecamatan Pasilambena akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan.

Sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pasilambena dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2022 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur daerah dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan umum.
3. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan sosial daerah.
4. Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
5. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat.
6. Terlaksananya peletakan landasan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN INDONESIA TIMUR.

**TC.28 Indikator Kinerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten  
Kepulauan Selayar 2022 - 2026 (mengacu pada tujuan dan  
sasaran renstra)**

## TC.28

Indikator Kinerja Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar 2022 – 2026 (mengacu pada tujuan dan sasaran renstra)

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pelayanan di Tk. Kecamatan dan Desa/Kelurahan	30 Menit	25 Menit	20 Menit	15 Menit	10 Menit	8 Menit	8 Menit
2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Perencanaan pembangunan ( % )	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Penurunan Kasus Kriminal daladi Tingkat Kecamatan ( % )	n/a	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Presentase Konflik Sosial dan Keagamaan di Tingkat Kecamatan ( % )	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Program pemerintahan desa yang mendukung program pemerintah (%)	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021 - 2026. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana stratejik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2022 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Pasilambena. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Pasilambena.

Meskipun renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasilambena,           ,           2023

**Camat Pasilambena**

**ANDI IRWAN,S.Pd, M.M**

Nip. 1982041320060410

